

KEMANDIRIAN PEREMPUAN PEDAGANG KULINER WUJUD KESETARAAN GENDER MENGHADAPI MEA

Benedicta J.Mokalu

Jurusan Sosiologi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Universitas Sam Ratulangi

benedictamokalu@yahoo.co.id

ABSTRAK

Peran perempuan sangat dominan dalam usaha kuliner tradisional di pantai Malalayang 2 (destinasi wisata kuliner tradisional sabua bulu), sebagai sarana bagi perempuan menyalurkan kemampuan-kemampuan kodratnya. Hanya saja Pemerintah kota Manado belum punya program pemberdayaan, yakni melatih perempuan agar memiliki kemampuan, pengetahuan serta ketrampilan tentang rupa-rupa kuliner nasional juga internasional.

Sebagai destinasi wisata lokasi ini masih berhadapan dengan beberapa masalah serius; pembangunan lapak jualan kurang memperhatikan aspek higienis, keamanan dan keamanan serta aspek ekonomis (tidak ada toilet umum, posisi lapak saling berdempet-dempetan, letak lapak sangat dekat dengan jalan raya, sangat rawan kecelakaan, kurang tempat parkir). Selain itu, pembagian lapak-lapak ini kurang memperhatikan minat dan bakat berdagang, dilakukan secara acak bahkan hanya berdasarkan selera kedekatan dengan penguasa.

Tujuan tulisan ini hendak mengajak Kelurahan Malalayang Dua/Pemkot Manado serta semua pihak terkait agar segera membenahi destinasi wisata ini dengan memperhatikan keyamanan, higienis, memperjelas aturan pengelolah, serta membantu perempuan mau mengembangkan potensi dirinya sehingga menjadi lebih produktif menghadapi persaingan MEA.

Kata Kunci: Kemandirian dan kesetaraan gender, MEA, perempuan pedagang kuliner

PENDAHULUAN

Pantai Malalayang dan Kalasey merupakan salah satu destinasi pariwisata di kota Manado sejak tahun 1980-an. Pantai ini selalu dipadati pengunjung, menjadi incaran wisatawan lokal, warga masyarakat kota Manado dan sekitarnya. Warga memanfaatkan sebagai tempat mandi dan berenang pada hari libur nasional dan pada hari minggu. Letak pantai ini sangat dekat dengan pusat kota Manado, sekitar 30 menit menggunakan mobil, terletak di jalur trans Sulawesi, sangat dekat dengan stasiun luar kota, sehingga sepanjang dua puluh empat jam selalu ramai.

Para perempuan (ibu-ibu dan anak-anak) menjajakan makanan tradisional terutama jagung (milu) rebus dan pisang goreng (kukis pisang) dengan cara menjinjing dan langsung menemui pengunjung. Beberapa dari pedagang melengkapi usaha dengan penyewaan ban mobil sebagai pelampung serta menyediakan air bersih untuk bilas usai mandi air laut. Sejak itu,



sepanjang pesisir pantai berubah warna berjejalan aneka warna – warni tarpal yang dipakai oleh pedagang “asongan” turut menghiasi pantai ini. Tarpal-tarpal ini tidak hanya ada pada hari libur atau hari minggu saja, melainkan setiap hari. Maka selanjutnya semua pedagang pasti mengejar keuntungan yang lebih besar sehingga mendorong bertumbuh subur semakin banyak bangunan-bangunan darurat dengan atap tarpal. Kalau sebelumnya, tenda biru hanya dipasang pada hari-hari libur saja, lama kelamaan tenda biru berubah fungsi menjadi tempat mencari nafkah sekaligus tempat hunian.

Abrasi sangat mengancam keselamatan jalan trans Sulawesi di pantai Malalayang dan pantai Kalasey. Pada tahun 2010 pemerintah lintas Kementrian mencanangkan program penyelamatan pantai dengan melakukan pembuatan talut pemecah ombak. Program ini berlangsung selama dua tahun, dari tahun 2010 hingga 2012.

Pada tahun 2012 seiring dengan penggunaan lapak sebagai usaha kuliner, pemetintah kota Manado menggelontorkan slogan Ekowisata dan merupakan salah satu jargon andalan yang dijual oleh pemerintah kota Manado hingga (2015). Namun kalau mau jujur, tujuan utama wisatawan ke Manado masih ke Bunaken. Padahal propinsi Sulut memiliki destinasi pariwisata sangat banyak, sangat cantik dan sangat unik. Tetapi masih sepi dari kunjungan wisatawan. Petanyaan refleksi; “Apa yang salah dengan pariwisata Manado dan Sulut? Bagaimana dengan promosi dan iklim sosial masyarakat? Bagaimana peran pakar dan analis kepariwisataan?”

Kita tentunya tidak ingin menghabiskan waktu hanya untuk debat kusir. Hanya saja diingatkan bahwa hampir semua negara mengandalkan pariwisata sebagai salah satu sumber mengais devisa. Ada banyak dolar yang berkeliaran di luar Manado yang bersumber dari wisatawan. Seandainya dolar-dolar itu bisa mengalir di kota Manado, semua pelaku bisnis pasti sangat senang. Hotel-hotel pasti penuh dengan wisatawan sehingga owner dan karyawan hotel selalu tersenyum, sopir-sopir taksi sibuk hilir mudik mengantar dan menjemput tamu serta “mungkin saja para pelacur tidak kesepian order.” Semua pebisnis tidak berteriak minta pemerintah mencabut aturan bahwa semua kegiatan instansi pemerintah tidak boleh menggunakan hotel.

Gertakan Kemenpan ini menguak mentalitas pengusaha sejatinya, “sangat menyedihkan.” “Mengapa demikian?” Hampir semua usaha jasa ‘merengek-rengok seperti anak kecil, masih belum mandiri, masih sangat bergantung pada pemerintah.’ Mudah-mudahan mereka rajin banyar



pajak, tidak mengabaikan hak-hak pekerja, serta tidak hanya mengumpulkan kekayaan untuk diri sendiri.

Pariwisata butuh strategi pemasaran, butuh program-program mempesona wisatawan tentunya membutuhkan kemampuan managerial yang hebat, cerdas dan kreatif, artinya ada seorang atau sekelompok orang tidak hanya memiliki standar akademik tertentu saja tetapi harus memiliki kemampuan “naluriah.”

- 1) kemampuan mengawinkann semua potensi bidang akademik dalam melakukan kajian–kajian dan analisis secara komprehensif secara cermat dan teliti sesuai multi kompleks bidang ilmu,
- 2) kualitas kreativitas dalam hal mampu mengambil keputusan pada waktu dan kesempatan yang tepat, serta menguntungkan,
- 3) kualitas manajerial adalah keberanian menyatukan (sinergisitas) dan mengendalikan semua kekuatan pro kontra, persepsi, asumsi dan potensi.

Oleh karena itu, kualifikasi seorang pemimpin dikatakan hebat bukan ditentukan oleh rumusan Visi dan Misi yang banyak dan berat, karena ada kecenderungan tidak efektif. Maka, dalam penyusunan visi dan misi harus sampai pada tatanan operasional atau aplikatif dengan syarat mudah dimengerti, mudah dilaksanakan, mudah diukur, mudah beradaptasi dengan perubahan (*fleksibility*). Kalau pun hanya satu visi dengan misi, tetapi jelas dalam tata-tatanan aplikatif adalah lebih baik, dari pada banyak tetapi hanya jadi pajangan dinding ruangan. Biar hanya satu program tetapi memiliki tingkatan pencapaian, asas kemanfaatan bisa dirasakan oleh semua sektor industri jasa serta semua masyarakat.

Masalah

Geliat pariwisata semakin terasa dengan kehadiran pelancong dari negeri Tiongkok. Minat perempuan kota Manado mau mengembangkan usaha kuliner tradisional sangat tinggi, hanya saja belum ditunjang dengan sarana, fasilitas, modal, ketrampilan, pengetahuan memadai. Pemerintah dengan alasan menyerap PAD lebih memiliki pengusaha dengan modal besar menguasai lokasi strategis ketimbang perempuan saha kuliner tradisional, dan bekelas, seperti; mall, super maket, hotel bahkan setiap ruas jalan strtegis untuk menjual kuliner.

Tujuan



Tulisan ini hendak mengajak dan mendorong Pemkot Manado mau bersinergi dengan semua komponen masyarakat (pengusaha, akademisi) melatih perempuan cerdas berkuliner dengan harapan kuliner tradisional menjadi ujung tombak pengembangan destinasi wisata.

Pendekatan (Metode Penelitian)

Tulisan ini mengacu pada hasil penelitian Wisata Kuliner Tradisional Sabuah Bulu di Pantai Malalayang Kelurahan Malalayang Dua kota Manado. Dengan pendekatan deskriptif Kualitatif terutama mengedepankan Studi Kasus (wawancara, diskusi) dengan semua stakeholders selaku informan. Penentuan Sumber informan mengacu pada Muhamad Idrus (2007:119), pemilihan subyek penelitian atau informan menggunakan *criterion-based selection* (Muhadjir,1993) yang didasarkan pada asumsi bahwa subyek tersebut sebagai aktor dalam tema penelitian yang diajukan. Selain itu dalam menentukan informan dapat menggunakan model *Snow Ball Sampling*.

Instrumen utama dalam tradisi penelitian kualitatif adalah peneliti sendiri dengan menggunakan alat bantu berupa catatan, tape recorder, foto dan peta. Moleong (2002:9) menjelaskan bahwa “orang (peneliti) sebagai instrumen memiliki senjata yang secara luwes dapat digunakannya”. Pendapat yang sama juga disampaikan oleh Merriam (dalam Creswell 1994:145) “peneliti kualitatif merupakan instrumen pokok untuk pengumpulan dan analisa data.

Pengumpulan data menggunakan observasi dan wawancara mendalam (*indep interview*) dan dokumentasi. Hal ini sejalan dengan pendapat Koentjaraningrat (1994:130) yang juga membagi teknik pengumpulan data menjadi tiga bagian yakni “pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara dan dokumentasi. Dokumen yang diteliti berbagai macam, tidak hanya dokumen resmi” (Soehartono (2002:70)

Analisis data mengacu pada Nasution (1988:126) adalah “proses menyusun data dalam arti menggolongkannya dalam pola, tema atau kategori agar dapat ditafsirkan”. Juga Suprayogo dan Tabroni, (2001:191) dengan melakukan penelaahan, pengelompokan, sistematisasi, penafsiran, dan verifikasi data agar sebuah fenomena memiliki nilai sosial, akademis, dan ilmiah. Oleh karena itu kegiatan analisis data dilakukan dengan cara membaca data yang telah diolah (Wasito,1997:89).

PEMBAHASAN

Bahasan tentang perempuan dan kesetaraan gender atau perempuan berwisata kuliner selalu menjadi topik yang menarik untuk disimak. Berdasarkan hasil penelitian tentang perempuan dan



pariwista (Studi kasus Destinasi Wisata Kuliner Tradisional Sabua Bulu) di Kelurahan Malalayang 2 Manado, menyimpulkan ada dua fenomena yang sangat menarik, dibahas dalam tulisan ini.

Perempuan berkuliner sebagai bentuk implementasi kesetaraan gender

Sebagai perempuan pelaku usaha kuliner tradisional sadar diri masih banyak kekurangan, dalam hal; ketrampilan mengolah masakan kuliner, mental sebagai wirausahawan. Selama ini para perempuan pedagang usaha kuliner hanya berjalan secara alami, hanya mengandalkan naluri masing-masing, dengan modal sangat terbatas. Sentuhan pemerintah kota Manado selama ini kurang maksimal, bahkan yang lebih banyak yakni kata-kata ancaman ketimbang dorongan serta tindakan nyata untuk memajukan usaha ini. Kondisi seperti ini membuat suasana hati para pedagang merasa tidak nyaman, tidak ada kepastian. Oleh karena itu, semua perempuan pedagang tidak peduli adanya MEA. Karena saat ini saja sudah tidak berdaya, jadi tidak ada manfaatnya memikirkan sesuatu yang belum pasti.

Sudah sering para pejabat dan orang-orang pintar di daerah ini berkali-kali mengatakan pemenang dalam semua persaingan adalah mereka yang memiliki kemampuan dan ketrampilan handal. Faktanya hanya jual kecap saja, tanpa tindakan nyata. Akibatnya, sebagian perempuan pedagang putus asa, meninggalkan lapak-lapak jualan, bahkan sebagiannya dengan rupa-rupa alasan telah menyewakan lapaknya.

Tidaklah berlebihan kalau pada tulisan ini kami mengatakan bahwa perempuan berkuliner dengan berbagai romantika suka dan duka, secara sederhana dimaknai sebagai sebuah proses kesetaraan dan keadilan gender. Melalui kegiatan-kegiatan produktif baik secara langsung maupun bersama dengan anggota keluarga lain. Tetapi yang terpenting adalah perempuan bisa memerankan dirinya, mengeksplorasi kemampuan-kemampuan kodratnya demi dirinya sendiri juga demi keluarganya. Hal ini merupakan bagian dari penegasan hak-hak asasi manusia yang menjadi pembahasan khusus dalam forum-forum internasional sejak tahun 1980-an. Perhatian dunia semakin meningkat terhadap kesetaraan gender sebagai bagian penting dalam mencapai kesejahteraan dan keberhasilan pembangunan. Gender dalam konteks ini diintegrasikan kedalam pendekatan kesejahteraan universal yang menjadi bagian dari perangkat hukum dan kesepakatan internasional di bawah PBB. Adapun kesetaraan dan keadilan gender diterapkan melalui strategi *Gender Mainstreaming* atau Pengarusutamaan Gender (PUG) yang merupakan pematangan dari



strategi *Gender and Development*.¹

Harus diakui bahwa selama ini pendekatan pembangunan terutama di negara-negara sedang berkembang belum secara khusus mempertimbangkan manfaat pembangunan secara adil terhadap perempuan dan laki-laki sehingga turut memberi kontribusi terhadap timbulnya ketidaksetaraan dan ketidakadilan gender. Kesenjangan gender (*Gender gap*), akan berdampak pada permasalahan gender (*gender issues*) dalam pembangunan ditandai dengan:

- 1) Kesenjangan bidang pendidikan, baik pada akses dan partisipasi, terutama pada tingkatan perguruan tinggi, dan masih adanya gender stereotype dalam pilihan jurusan akibat pemberian peran dikotomis (seksis) terhadap keduanya. Dengan demikian semakin kecil jumlah partisipasi perempuan, dan pengelompokan bidang studi yang ditekuni keduanya atas dasar jenis kelamin.
- 2) Masih rendahnya peluang bagi perempuan untuk bekerja dan berusaha, akses dan peran di bidang ekonomi, teknologi informasi, pasar, kredit dan modal kerja. Meskipun sebagai perempuan telah banyak berperan pada sektor ekonomi, tetapi masih dianggap sebagai pencari nafkah tambahan yang berakibat penghargaan terhadap mereka masih tidak setara dengan laki-laki.
- 3) Kedehatan reproduksi bagi perempuan di Indonesia masih perlu memperoleh perhatian khusus. Angka kematian ibu melahirkan masih tinggi, belum terpenuhinya gizi bagi ibu dan anak serta kelangsungan hidup anak, penggunaan alat kontrasepsi aman dan sebagainya.
- 4) Belum terwujudnya keseimbangan partisipasi perempuan dalam pengambilan keputusan publik sehingga kebutuhan gender praktis maupun kebutuhan gender strategis masih belum terpenuhi. Minimnya peran perempuan pada sektor pemerintahan baik sebagai legislator maupun posisi-posisi strategis pada tingkat eksekutif, TNI, POLRI dan instansi penegak hukum seperti kejaksaan dan pengadilan disebabkan hambatan-hambatan kultural maupun struktural.²

Beijing *Platform for Action* (BPFA) pada Konverensi PBB untuk Perempuan keempat, tahun 1995 menjadi titik awal dari upaya konkret mengarusutamaan gender dalam kebijakan

¹ Gender and Development (GAD) merupakan respons dari kegagalan pelaksanaan strategi Women in Development yang memfokuskan gerakannya pada perempuan sebagai realitas biologis. GAD memfokuskan gerakannya pada hubungan gender dalam kehidupan social.

² Tim, Penyusun, Panduan Pelaksanaan Inpres Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Nasional (Edisi II), Jakarta Kementerian Pemberdayaan Perempuan, 2002: 1-2.



pembangunan dengan sarasannya adalah kebijakan pemerintah. PUG diintegrasikan dalam siklus pembangunan yang meliputi perencanaan dan penganggaran, pelaksanaan dengan memasukkan kesetaraan gender dalam penyusunan program dan monitoring evaluasi kegiatan. Sasaran tembaknya adalah kebijakan (Negara), aksi (masyarakat), serta institusi (Negara dan masyarakat).³ Dengan demikian PUG secara umum diterapkan pada institusi pemerintah, organisasi, kelompok masyarakat, hingga keluarga.

Bagaimana memahami kondisi faktual perlakuan terhadap kesetaraan gender serta solusi-solusinya? Gender dalam perspektif teori konstruksi sosial sebagaimana yang dikembangkan oleh Berger dan Luckman,⁴ konstruksi sosial berangkat dari metode analisis fenomenologis, yakni metode deskriptif yang berdasarkan pada empirik – merupakan dialektika antara pendekatan gaya Weber dan Durkheim. Berger dan Luckmann memodifikasikan dalam suatu perseptif dialektik yang diambil dari Marx dan pemberian tekanan pada konstitusi kenyataan sosial melalui makna-makna subyektif yang diambil dari Weber.

Menurut teori konstruksi fungsional dengan paradigma fakta sosial lebih memenangkan peran struktur sosial dalam mempengaruhi perilaku manusia. Di bagian lain teori tindakan yang berparadigma definisi sosial memenangkan individu sebagai aktor yang menentukan struktur tindakan dengan mengabaikan struktur sosial yang berada di luar dirinya. Sedangkan menurut Schulltz bahwa dunia sosial memiliki sesuatu yang tersubjektif yang penuh dengan makna (*meaningfull*). Melalui metode analisis fenomenaologis dalam kehidupan sehari-hari yang disebut dengan pengalaman subyektif, maka obyek yang berbeda-beda menampilkan diri dalam kesadaran sebagai unsur yang membentuk sebuah lingkungan yang berbeda-beda pula.⁵

Menurut teori konstruksi sosial bahwa masyarakat merupakan produk manusia dan manusia merupakan produk masyarakatnya. Keduanya menggambarkan sifat dialekti inern dari fenomena masyarakat. Berger menggabungkan berbagai perspektif dari ragam aliran teori sosiologi yang mempertimbangkan aspek-aspek lain menjadi konstruksi teoritis yang mampu tampil, menjawab persoalan pluralistik, dinamis dan kompleks.

³ Muhajir M. Darwin, Negara dan Perempuan Reorientasi Kebijakan Publik (Yogyakarta: Media Wacana, 2005)

⁴ Peter Berger dan Thomas Luckman, Tafsir Sosial atas Kenyataan Risalah tentang Sosiologi Pengetahuan, terj. Hasan basri (Jakarta, LP3ES, 1990:24).

⁵ Berger memiliki sikap berbeda dengan Sosiolog lain dalam menyikapi keragaman aliran dalam sosiologi. Berger mencari solusi atas pertentangan paradigma dan mencari titik temu gagasan Marx, Durkheim dan Weber pada aspek historisitas. Perpaduan ini digunakan Berger memasukkan makna (Schutz) yang menghasilkan watak ganda masyarakat, masyarakat sebagai kenyataan subyektif (Weber) dan masyarakat sebagai kenyataan obyektif (Durkheim), yang berdialektika (Marx).



Berger mengemukakan bahwa proses dialektik fundamental dari masyarakat terdiri dari tiga momentum, yaitu:⁶ Pertama, eksternalisasi; Kedua, obyektivitas; Ketiga, internalisasi. Ketiga proses dialektik tersebut dikuatkan oleh legitimasi yang berdimensi kognitif dan normatif yang disebut dengan kenyataan sosial.

1) Eksternalisasi

Eksternalisasi⁷ adalah suatu pencurahan kedirian manusia secara terus menerus ke dalam dunia, dalam aktifitas fisik maupun mentalnya. Dalam proses eksternalisasi terjadi interaksi antara manusia dengan lingkungannya bersifat terbuka. Eksternalisasi dipengaruhi oleh *stock of knowledge* (cadangan pengetahuan) yang dimilikinya. Cadangan sosial pengetahuan adalah akumulasi dari *common sense knowledge* (pengetahuan akal sehat). *Common sense* adalah pengetahuan yang dimiliki individu bersama individu-individu lainnya dalam kegiatan rutin yang normal dan secara otomatis terjadi dalam kehidupan sehari-hari. Proses untuk menjadi manusia sejak dilahirkan hingga dewasa berlangsung tidak hanya dalam hubungan timbal balik dengan lingkungannya. Tetapi juga dengan tatanan budaya dan sosial yang spesifik, melalui perantaraan orang-orang yang berpengaruh dalam hidupnya.

Menurut Berger dan Luckman bahwa manusia membangun dunia yang dihasilkan oleh dirinya, dia juga membangun dirinya sendiri dalam interaksi sosialnya yang melahirkan kebudayaan. Kebudayaan terdiri dari totalitas produk manusia material maupun non material misalnya institusi, alat, simbol, bahasa dan sebagainya yang bersifat tidak stabil, tergantung pula ruang dan waktu.⁸

2) Obyektivasi

Obyektivasi adalah produk – produk aktivitas manusia baik fisik maupun mental, merupakan realitas yang berhadapan dengan para produsernya, karena antara manusia dengan produk aktifitasnya merupakan dua entitas yang terbuka. Manusia membangun dunia institusional obyektif melalui aktivitas yang membutuhkan cara tidak hanya sekedar penjelasan proses legitimasi, tentang asal usul pengertian prana sosial dan proses pembentukannya dan mengaitkan sistem makna yang melekat pada lembaga-lembaga atau praktik institusional dan konsensus di bawah ideologi. Di antara keragaman

⁶ Peter L. Berger, *Langit suci Agama Sebagai Realitas Sosial*, terj. Hartono (Jakarta: LP3ES, 1994: 4-5)

⁷ Berger dan Luckman, *Tafsir Sosial atas Kenyataan*, 34

⁸ *Ibid*, 8-9



kenyataan, akan tampil satu kenyataan *par excellence* yang disebut dengan kenyataan hidup sehari-hari. Upaya masyarakat untuk melembagakan pandangan atau pengetahuan mereka tentang masyarakat dalam aktivitasnya sehari-hari tersebut akhirnya mencapai generalitas yang paling tinggi, di mana dibangun suatu dunia arti simbolik yang universal yang disebut dengan pandangan hidup atau ideologi.

3) Internalisasi

Internalisasi merupakan peresapan kembali realitas obyektif tersebut oleh manusia, dan mentransformasikan lagi dari struktur-struktur dunia obyektif kepada struktur-struktur kesadaran subyektif. Menurut Berger dan Luckmann.⁹ Proses internalisasi merupakan salah satu momentum dari proses dialektik yang lebih besar yang juga termasuk momentum – momentum eksternalisasi dan obyektivasi. Individu tidak dicipta sebagai suatu dunia yang pasif, namun dibentuk dalam waktu dialog yang lama. Individu tidak sekedar menyerap dunia sosial baik dalam lembaga-lembaga, peran-peran dan identitas-identitas secara pasif, tetapi secara pro aktif diambalnya. Dengan demikian individu secara terus menerus menjawab dunia yang membentuknya dan karenanya terus memelihara dunia sebagai realitas.

Melalui proses internalisasi, seseorang mampu untuk memahami dirinya, pengalaman masa lalunya dan yang diketahuinya secara obyektif mengenai dirinya dan orang lain. Pengalaman yang berkelanjutan diintegrasikan dalam tatanan kehidupan yang dimodifikasi sehingga makna-makna yang dipahami dapat diproyeksikan kepada masa depan secara obyektif dalam struktur kelembagaan maupun secara subyektif sebagai kesadaran individu.

Anthony Giddens membangun teori strukturasi berawal dari kegelisahan akademiknya terhadap para pemikir sebelumnya yang cenderung menggunakan interpretasi naturalis dalam teori sosial yang berangkat dari filsafat positivis yang berdampak pada reduksionalis dan esensialis dalam pengembangan teori sosial. Menurut paradigma positivis memandang bahwa masyarakat sebagai ekspresi prinsip identitas dan perkembangan yang melandasi masyarakat. Aktor direduksi sebagai produksi kekuatan sosial yang *impersonal* dan *determinatif*.¹⁰ Menurut Giddens pendekatan ini menggunakan teori tindakan (*theory of action*) yang tereduksi sebab lebih mengutamakan masyarakat daripada pelaku.

⁹ Peter L. Berger, Langit Suci, 22-24

¹⁰ Peter Beilharz, Teori-teori Sosial Observasi Kritis terhadap para Filosof Terkemuka, Terj. Sigit Jatmiko (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005: 192)



Berdasarkan pengalaman gagalnya pemikiran tradisional dalam mengkonsepsikan hakikat struktur dan tindakan serta hubungan timbal balik keduanya, Giddens menyimpulkan bahwa perlu adanya rekonstruksi dalam teori sosial yaitu sosialologi imperatif, fungsionalisme dan strukturalisme. Namun, ketika teori tersebut menurutnya tidak untuk di tinggalkan, tetapi untuk mencari solusi terhadap kekurangan dari ketiganya. Giddens menamakan upaya ini dengan istilah “rekonseptualisme”¹¹ atas tindakan, struktur, sistem untuk diintegrasikan menjadi sebuah teori baru.

Giddens juga menegaskan bahwa kehidupan sosial manusia bisa dipahami berdasarkan relasi-relasi di antara individu-individu yang bergerak, dan membedakan satu konteks dari konteks yang lain. Konteks-konteks membentuk latar (*setting*) bagi tindakan, dimana kualitas-kualitas agen secara rutin dibentuk berdasarkan arah pengorientasian apa yang mereka kerjakan dan apa yang mereka katakan satu sama lain.¹²

Kemandirian Sumber Daya Perempuan pedagang menghadapi era persaingan MEA

Persaingan MEA sudah tak terhidarkan lagi, tidak ada waktu untuk berkeluh kesah, saling menunjuk batang hidup sebagai pihak yang harus bertanggungjawab. Kita sudah tidak punya waktu untuk debat kusir, karena saat ini semua orang harus bekerja, bekerja dan bekerja, menekuni apa yang sudah di depan mata sambil maksimalkan semua potensi dan daya sehingga bisa menjadi pemenang dalam era persaingan MEA ini.

Tuntutan zaman mengharuskan setiap usahawan tak terkecuali kuliner tradisional untuk mengembangkan kemampuan diri, mengembangkan setiap masakan sehingga beraroma kuliner internasional. Fakta olahan masakan kuliner di pantai Malalayang dari sisi kualitas dan kuantitas menu yang disajikan masih sangat sederhana. Dari sisi kualitas olahan masakan kurang memperhatikan aspek higienis, sebaliknya, dari sisi kuantitas menu, hanya sebatas pisang goreng, jagung rebus, tino tuan, mie ceplok, nasi campur, serta minuman air kelapa muda dan rupa-rupa minuman industri.

Lemahnya kemandirian para pedagang perempuan di pantai Malalayang 2 Manado tak terpisahkan dengan kondisi riil nasib perempuan Indonesia. Kementerian Pemberdayaan dan

¹¹ Ibid, 193

¹² Anthony Giddens dan Jonathan Turner, *Social Theory Today*, Terj. Yudi Santoso (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008: 367)



Perlindungan Perempuan menyebutkan bahwa sebanyak 60 % pelaku UKM di Indonesia adalah perempuan. *HDI (Human Development Index)* menunjukkan bahwa SDM Indonesia menempati peringkat ke 6 dibawah Negara-negara Asean lainnya, seperti Malaysia, Thailand, Brunei, Philipina, dan Singapore. Sementara itu, dari data *Asian Productivity Organization (APO)* mencatat, dari setiap 1.000 tenaga kerja Indonesia pada tahun 2012, hanya ada sekitar 4,3% tenaga kerja yang terampil. Jumlah itu kalah jauh dibandingkan dengan Filipina yang mencapai 8,3%, Malaysia 32,6%, dan Singapura 34,7%.

Berdasarkan pengertian tentang kemandirian dan proses sosialisasi kemandirian maka paling sedikit dapat diidentifikasi tiga sumber yang dapat merangsang berkembangnya kemandirian perempuan Indonesia:¹³ (1) sebagai konsekuensi dibesarkan dalam kondisi social-ekonomi keluarga yang serba kekurangan 2. Sebagai manifestasi tradisi dan sistem sosial yang mendorong kemandirian perempuan sebagai anggota masyarakat, 3. Sebagai konsekuensi dari latar belakang pendidikannya dan pengalamannya.

Melalui proses mengamati apa yang dilakukan perempuan lain dilingkungannya, ia juga mengamati apa yang menjadi konsekuensi dari perilaku tersebut. Atas dasar pengamatannya ia melakukan hal-hal yang oleh lingkungan ditentukan baginya karena ia anak perempuan. Pengertian tentang peran seksualnya sebagai perempuan biasanya masih ditambah dengan mendengarkan nasehat atau ceritera rakyat tentang apa artinya menjadi perempuan. Sehingga secara lambat tetapi nyata ia, sebagai anak perempuan, mulai mengembangkan pengetahuan tentang identitas seksualnya. Ia juga belajar tentang perbedaan antara perempuan dan laki-laki, termasuk stereotipe yang berlaku di lingkungannya tentang apa yang pantas dilakukan perempuan atau laki-laki (feminitas dan maskilinitas).

Sumber lain yang memacu kemandirian perempuan ialah tradisi dan sistem sosial beberapa suku. Menurut Manderson L (editor 1983 menulis bahwa perempuan Aceh, Sumatera barat dan Batak selalu mempunyai peranan penting dalam kehidupan ekonomi. Peranan ini berkaitan erat dengan adanya tradisi dalam suku-suku tersebut mengenai anggota keluarga lelaki yang meninggalkan keluarga untuk mencari pengalaman dan mencari kerja. Kepergian seorang ayah sebagai kepala keluarga (migrasi ke kota) untuk jangka waktu tertentu tidak dianggap janggal. Karena ada anggapan bahwa selama ayah absen dari lingkungan keluarga, maka perempuan

¹³ Saporinah Sadli, *Kemandirian Perempuan dalam Kemandirian Perempuan Indonesia* Kelompok Studi wanita Pusat Penelitian Universitas Brawijaya Malang, 1991:34,36



sebagai istri dan ibu mengambil alih tanggungjawab di lingkungan rumah tangga maupun komunitasnya.

Kemandirian karena pendidikan dan pengalaman. Pendidikan sebagai suatu proses selain memberi pengalaman untuk mengembangkan akal budi seseorang, juga memberikan pengalaman untuk dapat secara mandiri menerapkan pengetahuan dan keahlian yang diperoleh. Kemandirian pendidikan dapat meningkatkan kualitas peran sumber daya manusia (*human resources*) dan sumber daya alam (*natural resources*) sangat penting dalam pembangunan suatu bangsa.¹⁴ Pengembangan sumber daya manusia (*human resources development*) secara makro, adalah suatu proses peningkatan kualitas atau kemampuan manusia dalam rangka mencapai suatu tujuan pembangunan bangsa. Proses peningkatan di sini mencakup perencanaan, pembangunan, dan pengelolaan sumber daya manusia (*human investment*).

Beberapa ahli di bawah ini mengemukakan definisi pemberdayaan dilihat dari tujuan, proses dan cara-cara pemberdayaan:¹⁵ (1) Pemberdayaan bertujuan untuk meningkatkan kekuasaan orang-orang yang lemah atau tidak beruntung (Ife, 1955). (2) Pemberdayaan adalah sebuah proses dengan mana orang menjadi cukup kuat untuk berpartisipasi dalam, berbagai pengontrolan atas, dan mempengaruhi terhadap, kejadian-kejadian serta lembaga-lembaga yang mempengaruhi kehidupannya. Pemberdayaan menekankan bahwa orang memperoleh ketrampilan, dan kekuasaan yang cukup untuk mempengaruhi kehidupannya dan kehidupan orang lain yang menjadi perhatiannya (Parsons, 1994).

Pemberdayaan memuat dua pengertian kunci, yakni kekuasaan dan kelompok lemah. Kekuasaan di sini diartikan bukan hanya menyangkut kekuasaan politik dalam arti sempit, melainkan kekuasaan atau penguasaan klien atas:¹⁶ (1) Pilihan-pilihan personal dan kesempatan-kesempatan hidup kemampuan dalam membuat keputusan-keputusan mengenai gaya hidup, tempat tinggal, pekerjaan. (2) Pendefinisian keutuhan: kemampuan menentukan kebutuhan selaras dengan aspirasi dan keinginannya. (3) Ide atau gagasan: kemampuan mengekspresikan dan menyumbangkan gagasan dalam suatu forum atau diskusi secara bebas dan tanpa tekanan. (4) Lembaga-lembaga: kemampuan menjangkau, menggunakan, mempengaruhi pranata - pranata

¹⁴ S. Notoatmodjo (2003: 2 – 13). *Pengembangan Sumberdaya Manusia*. Rineka Cipta. Jakarta.

¹⁵ Suharto, Edi, 1997: 210-224. *Pembangunan, Kebijakan Sosial dan Pekerja Sosial: Spektrum Pemikiran*. Bandung. Lembaga Studi Pembangunan Sekolah Tinggi Kesejahteraan Sosial.

¹⁶ Ife, Jim. 1995: 61-64. *Community Development: Community Base Alternatives in an age of Globalisation* second Edition. Australia: Person Education Australia Pty. Ltd.



masyarakat, seperti lembaga kesejahteraan sosial, pendidikan, kesehatan. (5) Sumber-sumber: kemampuan memobilisasi sumber-sumber formal, informal dan kemasyarakatan. (6) Aktivitas ekonomi: kemampuan memanfaatkan dan mengelola mekanisme produksi, distribusi, dan pertukaran barang serta jasa. (7) Reproduksi: kemampuan dalam kaitannya dengan proses kelahiran, perawatan anak, pendidikan dan sosialisasi.

Memberdayakan adalah upaya untuk meningkatkan harkat dan mertabat lapisan masyarakat yang keterbelakang.¹⁷ Dengan kata lain, memperdayakan adalah memampukan dan memandirikan masyarakat. Dalam kerangka pemikiran itu, upaya memperdayakan masyarakat haruslah dilakukan dengan: “Menciptakan suasana atau iklim yang memungkinkan potensi masyarakat berkembang. Upaya itu harus diikuti dengan memperkuat potensi atau daya yang dimiliki oleh masyarakat. Beriringan dengan penguatan pranata - pranata budaya yang sudah ada sebagai pengimbang kehadiran budaya import / asing. Demokratisasi dan partisipasi aktif masyarakat berperan dalam pembangunan masyarakat (masyarakat aktif).

Pemberdayaan juga merupakan proses melindungi dan membangun rasa berkeadilan. Tahap-tahap pemberdayaan yang harus dilalui, di antaranya.¹⁸ (1) Membantu masyarakat dalam menemukan masalahnya. (2) Melakukan analisis (kajian) terhadap masalah tersebut secara mandiri (partisipatif). (3) Menentukan skala prioritas masalah. (4) Mencari penyelesaian masalah yang sedang dihadapi. (5) Melaksanakan tindakan nyata untuk menyelesaikan masalah yang sedang dihadapi. (6) Mengevaluasi seluruh rangkaian dan proses pemberdayaan itu untuk dinilai sejauhmana keberhasilan dan kegagalan.

KESIMPULAN DAN SARAN

Pemerintah kota Manado lebih serius menata destinasi wisata kuliner tradisional sabua bulu ini sehingga layak menyandang predikat destinasi wisata andalan di kota Manado. Keberadaan destinasi wisata Malalayang 2 ini selanjutnya tergantung dari pemerintah.

Menurut masyarakat pedagang, sebaiknya destinasi wisata ini tetap seperti saat ini, hanya saja perlu penataan kembali semua lapak agar memiliki tempat parkir serta menyediakan MCK yang cukup agar bisa menjaring lebih banyak wisatawan lokal juga manca Negara. Demikian

¹⁷ Kartasasmitha, 1997: 11-12. *Pemberdayaan Masyarakat. Konsep Pembangunan yang Berakar pada Masyarakat*. Jakarta: Badan Perencanaan Pembangunan Nasional

¹⁸ Azis, 2005: 135. *Pendekatan Sosial. Kultur dalam Pemberdayaan Masyarakat*. Yogyakarta. Pustaka Pesantren.



halnya niat untuk mengembangkan usaha ini ke depan, guna menjawab tantangan MEA sepenuhnya diserahkan pada anak-anak. Kami yakin anak-anak lebih mengerti serta mengetahui cara-cara yang paling tepat menghadapi persaingan MEA.

Adapun saran, pemerintah kota Manado hendaknya sungguh-sungguh membantu perempuan pedagang kuliner sabuah bulu di pantai Malalayng 2 ini memiliki memiliki pengetahuan dan kemampuan yang cukup, seperti; memiliki kepercayaan diri, mampu menyampaikan aspirasi, mempunyai mata pencaharian, berpartisipasi dalam kegiatan sosial, dan mandiri dalam melaksanakan tugas-tugas kehidupannya.

PUSTAKA

- Anthony Giddens dan Jonathan Turner, *Social Theory Today*, Terj. Yudi Santoso (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008: 367)
- Azis, 2005: 135. *Pendekatan Sosial. Kultur dalam Pemberdayaan Masyarakat*. Yogyakarta. Pustaka Pesantren.
- Ife, Jim. 1995: 61-64. *Community Development: Community Base Alternatives in an age of Globalisation* second Edition. Australia: Person Education Australia Pty. Ltd.
- Kartasasmitha, 1997: 11-12. *Pemberdayaan Masyarakat. Konsep Pembangunan yang Berakar pada Masyarakat*. Jakarta: Badan Perencanaan Pembangunan Nasional
- Muhajir M. Darwin, *Negara dan Perempuan Reorientasi Kebijakan Publik* (Yogyakarta: Media Wacana, 2005)
- Peter L. Berger dan Thomas Luckman, *Tafsir Sosial atas Kenyataan* Risalah tentang Sosiologi Pengetahuan, terj. Hasan basri (Jakarta: LP3ES, 1990: 24, 34)
- Peter L. Berger, *Langit suci Agama Sebagai Realitas Sosial*, terj. Hartono (Jakarta: LP3ES, 1994: 4-5, 8-9, 22-24)
- Peter Beiharz, *Teori-teori Sosial Observasi Kritis terhadap para Filosof Terkemuka*, Terj. Sigit jatmiko (Yogyakarta: Pustaka pelajar, 2005: 192-193)
- Saparinah Sadli, *Kemandirian Perempuan dalam Kemandirian Perempuan Indonesia Kelompok Studi wanita Pusat Penelitian Universitas Brawijaya Malang*, 1991: 34, 36
- Suharto, Edi, 1997: 210-224. *Pembangunan, Kebijakan Sosial dan Pekerja Sosial: Spektrum Pemikiran*. Bandung. Lembaga Studi Pembangunan Sekolah Tinggi Kesejahteraan Sosial.
- Tim, Penyusun, *Panduan Pelaksanaan Inpres Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Nasional (Edisi II)*, Jakarta Kementerian Pemberdayaan Perempuan, 2002: 1-2.

